

Peran Bank Rakyat Indonesia Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Indonesia

Zulfan Heri

Universitas Riau

zulfan.heri7713@grad.unri.ac.id

ABSTRAK

Peningkatan inklusi keuangan diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat *unbanked* atau yang belum memiliki rekening bank karena tidak memiliki akses layanan perbankan dasar seperti tabungan yang merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan hidup masyarakat. Inklusi keuangan dinilai dapat mendorong pemerataan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Hal ini pun mendorong PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memiliki visi menjadi “*Champion of Financial Inclusion*” pada 2025. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan inklusi keuangan yang banyak melibatkan kontribusi dari berbagai pelaku usaha dan akan lebih baik dibandingkan dengan hanya berfokus pada pelaku usaha tertentu. Dia menyebut visi BRI sejalan dengan visi pemerintah yang mencanangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90% pada 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks inklusi keuangan masih sebesar 85,10%. Nilai ini masih di bawah nilai yang dicanangkan, tetapi meningkat jika dibandingkan hasil SNLIK 2019 yakni sebesar 76,19%.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Indeks Inklusi Keuangan

Pendahuluan

Financial Inclusion (Inklusi Keuangan) menjadi tren pasca krisis 2008, terutama didasari dampak krisis kepada kelompok pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Peningkatan inklusi keuangan diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat *unbanked* atau yang belum memiliki rekening bank karena tidak memiliki akses layanan perbankan dasar seperti tabungan yang merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan hidup masyarakat. Selain kebutuhan dasar dalam memiliki tabungan, masyarakat dengan kapasitas lebih juga dapat memiliki produk dan layanan keuangan lainnya seperti asuransi, pembiayaan, program pension, dan investasi yang dapat menunjang taraf hidup menjadi lebih baik.

Menurut world bank, inklusi keuangan adalah faktor pendukung utama dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Indonesia telah memiliki komitmen penuh dalam Upaya mendukung pertumbuhan tingkat inklusi keuangan di dalam negeri, antara lain melalui; a) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategis Nasional Keuangan Inklusif yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. b) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bersama Lembaga terkait dan Industri Jasa Keuangan mendukung pertumbuhan tingkat inklusi keuangan dengan mendorong pengembangan produk dan layanan jasa keuangan, serta mengupayakan pemenuhan empat elemen inklusi keuangan lainnya yaitu perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri.

Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty (2011) mengatakan inklusi keuangan mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran efisien, sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang menghasilkan manfaat ekonomi sebagai sumber daya dan tersedianya mekanisme pembayaran yang efisien dan alokatif. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan jumlah populasi penduduk yang besar, belum memiliki akses yang luas terhadap sektor formal lembaga keuangan dan juga menunjukkan rasio kemiskinan yang lebih tinggi dan ketimpangan yang lebih tinggi. Dengan demikian inklusi keuangan hari ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk implementasi inklusi keuangan.

Berdasarkan survei World Bank pada The Global Findex Database 2014, sekitar 36,1% penduduk dewasa di Indonesia sudah memiliki rekening, baik rekening pada lembaga keuangan sebanyak 35,9% maupun melalui rekening uang elektronik yang diakses melalui telepon seluler (mobile money) sebanyak 0,4%. Tingkat inklusi keuangan di Indonesia tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun 2011, dimana hanya terdapat 20% penduduk Indonesia yang memiliki rekening. Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki rekening pada tahun 2014 memberikan suatu indikasi akses layanan keuangan formal yang semakin meluas di Indonesia. meskipun demikian, kesenjangan dalam hal kepemilikan rekening masih tetap besar. Di antara penduduk dewasa yang termasuk kelompok 40% terbawah, hanya 22,2% yang memiliki rekening, sedangkan sisanya masih belum tersentuh oleh layanan keuangan. Selain kesenjangan dari sisi pendapatan, kesenjangan dari proporsi pria dan wanita yang memiliki rekening juga masih menjadi permasalahan. Dari total penduduk dewasa wanita di Indonesia, hanya 37,5% wanita yang memiliki rekening.

Inklusi keuangan dinilai dapat mendorong pemerataan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Hal ini pun mendorong PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memiliki visi menjadi “*Champion of Financial Inclusion*” pada 2025. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan inklusi keuangan yang banyak melibatkan kontribusi dari berbagai pelaku usaha dan akan lebih baik dibandingkan dengan hanya berfokus pada pelaku usaha tertentu. Dia menyebut visi BRI sejalan dengan visi pemerintah yang mencanangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90% pada 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan indeks inklusi keuangan masih sebesar 85,10%. Nilai ini masih di bawah nilai yang dicanangkan, tetapi meningkat jika dibandingkan hasil SNLIK 2019 yakni sebesar 76,19%.

Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis

Inklusi keuangan merupakan suatu skema pembiayaan inklusif, dengan tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin yang berpenghasilan rendah. Merujuk definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terminology inklusi keuangan mengacu kepada akses ke berbagai jasa keuangan, dengan biaya yang wajar, bagi orang-orang yang dianggap tidak bankable serta mereka yang menjalankan usaha di pedesaan, misalnya pertanian dan peternakan (United, 2006). Senada dengan PBB, Rangarajan Committee mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses untuk memastikan kaum miskin atau kalangan berpenghasilan rendah mendapatkan layanan keuangan. Umumnya berupa kredit dengan jangka waktu dan besaran biaya pengembalian yang masuk akal (reasonable) (Dasupta, 2019).

Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), inklusi keuangan didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan

penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil (BI, 2015).

Demirguc Kunt dan Leora Klapper mendefinisikan inklusi keuangan sebagai berfungsinya dengan baik system keuangan yang melayani tujuan penting seperti menawarkan tabungan, kredit, pembayaran, dan produk manajemen resiko kepada orang-orang dengan berbagai macam kebutuhan. System inklusi keuangan yang memungkinkan akses luas ke jasa keuangan, tanpa hambatan harga atau non harga untuk penggunaannya (Kunt & klapper, 2012).

Wahid menjelaskan bahwa gagasan inklusi keuangan bersumber dari beberapa teori ekonomi politik. *Pertama* adalah teori modernisasi. Teori ini menjelaskan bahwa Pembangunan ekonomi adalah persoalan ada tidaknya modal yang diinvestasikan. Sejalan dengan pemikiran ini, fenomena kemiskinanpun kemudian dijelaskan sebagai kondisi yang utamanya disebabkan oleh kurangnya modal yang diinvestasikan. Sebagai jalan keluarnya, maka modal itu mesti dicari, baik di dalam maupun diluar negeri, untuk kemudian diinvestasikan. Dengan demikian keberadaan modal dan investasi bersifat menentukan terhadap usaha pengentasan kemiskinan serta kemajuan Pembangunan ekonomi. Dengan perspektif semacam ini, setiap usaha pengentasan kemiskinan pada akhirnya harus dilihat sejalan dengan Upaya penyediaan modal (Wahid, 2014).

Kedua adalah teori investasi. Senada dengan teori modernisasi, teori ini menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan perkara rendahnya jumlah modal yang diinvestasikan. Untuk bisa maju, maka orang-orang miskin dan mereka yang berpenghasilan rendah mesti mendapatkan suntikan modal untuk diinvestasikan. Sebagai solusi, teori ini menggarisbawahi pentingnya skema inklusi keuangan sebagai system layanan keuanga yang memungkinkan kalangan miskin berpenghasilan rendah mendapatkan suntikan modal, yang pertama-tama dimungkinkan dengan cara menurunkan beban agunan (collteral) dan biaya pengembangan pinjaman (Wahid, 2014).

Ketiga adalah teori human capital. Dalam teori ini disebutkan bahwa manusia memerlukan akses ke dalam lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit usaha dalam rangka meningkatkan kapasitas diri. Pembiayaan tersebut misalnya digunakan untuk biaya Pendidikan sehingga seseorang bisa memperoleh pekerjaan dengan bayaran yang baik. Oleh karena itu, semua orang perlu mendapatkan akses yang sama ke dalam lembaga keuangan, yang akan ia gunakan untuk meningkatkan human capitalnya (Wahid, 2014).

Teori perilaku (Firm Behavior Theory) menyebutkan bahwa skema inklusi keuangan terbukti mempunyai efek eksternal yang sanggup memangkas berbagai biaya di dunia usaha. Dalam prakteknya, efisiensi yang terjadi di dunia usaha turut mendorong peningkatan produktifitas dan terciptanya peluang kerja baru (Marr & Schmied, 2013).

Di Indonesia, indikator keuangan inklusif dikenal dengan Indeks Keuangan Inklusif (IKI) yang merupakan salah satu cara alternatif untuk pengukuran inklusi keuangan yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makro ekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan Upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indicator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah system keuangan yang inklusif, yaitu akses (access), penggunaan (usage) dan kualitas (quality) dari layanan perbankan (BI, 2015).

Dimensi akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan. Dimensi penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan actual produk dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan.

Dimensi kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengukuran terhadap dimensi ini masih sukar untuk dilakukan dan saat ini beberapa lembaga internasional yang concern dalam pengembangan inklusi keuangan sedang Menyusun indikator dari dimensi kualitas beserta tools yang dipergunakan. Secara umum The Alliance for Financial Inclusion (AFI) telah menyepakati prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam menyusun indikator dari dimensi kualitas, meliputi ringkas (conciseness), spesifik (specificity), sederhana (simplicity), adanya perbaikan (improvement), dan client perspective (BI, 2015). Pengukuran dimensi kualitas dapat didekati salah satunya melalui pengukuran tingkat financial literacy (melek keuangan). Bank Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Demografi FEUI melakukan survei skor financial literacy pada tahun 2012. Skor financial literacy pada survei ini mengacu pada skor yang dibangun oleh OECD. Skor financial literacy dibangun dari 3 dimensi, yaitu pengetahuan keuangan, sikap terhadap keuangan dan perilaku keuangan yang kemudian diagregasi menjadi skor total untuk menggambarkan tingkat melek keuangan suatu negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kuncinya (Sugiyono, 2019).

Sementara itu menurut Walidin & Tabrani (2015) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau social dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada editor yang telah menelaah dan mereview Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi.

Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategis Nasional Keuangan Inklusif (2010). Indonesia
- Wahid, N. (2014). *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: Gramedia
- Chakrobarty, K. C. *Financial Inclusion and Banks: Issues and Perspective*. RBI Monthly Bulletin (November 2011)
- Sari, Y. R., Tejaningrum, I., Ramdan, A., Imamah, H., Lestari, D. A. (2017). Peningkatan Akses Keuangan Kelompok Masyarakat Atau Pelaku Usaha Melalui Pemanfaatan Produk/Jasa Layanan Keuangan Syariah. *Buku BI 2_Pilot Project Keuangan Syariah*
- Anam, K. (2022). *Punya Visi Tingkatkan Inklusi Keuangan, Ini Strategi BRI*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220607174716-17-345105/punya-visi-tingkatkan-inklusi-keuangan-ini-strategi-bri>
- Dasgupta, R. (2019). Two Approaches to Financial Inclusion. *Economic and Political Weekly*, 44(26), 41–44
- United, N. (2006). *Building Inclusive Financial Sector for Development*. The United Nation Department of Public Information

- Bank Indonesia (2015). Booklet Keuangan Inklusif. *National Strategy for Financial Inclusion Fostering Economic Growth and Accelerating Poverty Reduction*. Grup Pengembangan Keuangan Inklusif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM BANK INDONESIA
- Kunt, D., & Klapper, L. (2012). Measuring Financial Inclusion the Global Findex Database. *Research Working Paper*, 6025
- Marr, A., & Schmied, J. (2013). Financial Inclusion and Poverty: The Case of Peru. *The University of Greenwich*
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory. FTK Ar-Raniry Press